



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 4, 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 4, 2025

Pages: 4283–4289

Strategi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan: Review Literatur terhadap Program dan Kebijakan

Januar Barkah, Lengsi Manurung

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i4.3657>

How to Cite this Article

APA : Barkah, J., & Manurung, L. (2025). Strategi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan: Review Literatur terhadap Program dan Kebijakan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(4), 4283 – 4289. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i4.3657>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Strategi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan: Review Literatur terhadap Program dan Kebijakan

Januar Barkah^{1*}, Lengsi Manurung²

Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: januarmemangbarkah@gmail.com

Diterima: 20-07-2025

| Disetujui: 01-08-2025

| Diterbitkan: 08-08-2025

ABSTRACT

Urban poverty alleviation is a complex challenge that requires multidimensional and evidence-based strategies. This study employed a systematic literature review method by analyzing 28 selected publications from nationally accredited Sinta journals and reputable international journals published between 2015 and 2025. The findings reveal three main approaches: direct social assistance (PKH, BLT, KIP, KIS), community-based economic empowerment (MSMEs, skills training, cooperatives), and local governance policies (poverty data improvement, central–local policy synchronization). The most effective strategy is a combination of short-term social assistance and long-term economic empowerment supported by accurate data governance and cross-sector coordination. Key challenges include inaccurate poverty data, low community participation, and limited local resources. This study recommends adopting an integrated approach to achieve the Sustainable Development Goals target for urban poverty alleviation.

Keywords: urban poverty, social assistance, economic empowerment, data governance, public policy.

ABSTRAK

Pengentasan kemiskinan perkotaan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan strategi multidimensi dan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review dengan menelaah 28 publikasi terpilih dari jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional bereputasi yang terbit antara 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan tiga pendekatan utama yang digunakan: bantuan sosial langsung (PKH, BLT, KIP, KIS), pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (UMKM, pelatihan keterampilan, koperasi), dan kebijakan tata kelola daerah (perbaikan pendataan kemiskinan, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah). Strategi yang paling efektif adalah kombinasi bantuan sosial jangka pendek dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang dengan dukungan tata kelola data yang akurat dan koordinasi lintas sektor. Tantangan yang diidentifikasi meliputi ketidakakuratan data kemiskinan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya daerah. Temuan ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengadopsi pendekatan terintegrasi guna mencapai target Sustainable Development Goals dalam pengentasan kemiskinan perkotaan.

Katakunci: kemiskinan perkotaan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, tata kelola data, kebijakan publik

PENDAHULUAN

Kemiskinan perkotaan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga dengan dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup. Proses urbanisasi yang pesat di Indonesia telah memicu meningkatnya populasi di wilayah perkotaan, namun tidak selalu diiringi dengan distribusi kesejahteraan yang merata (Saputri et al., 2025). Kesenjangan pendapatan, terbatasnya akses terhadap layanan publik, dan ketimpangan kesempatan kerja menjadi faktor utama yang mempertahankan lingkaran kemiskinan di wilayah kota.

Strategi pengentasan kemiskinan perkotaan pada umumnya mencakup kombinasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi pangan telah dijalankan pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, literatur menunjukkan bahwa efektivitas program-program tersebut bervariasi, tergantung pada keakuratan data penerima manfaat, tingkat partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi (Nujum, 2010).

Pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas menjadi salah satu strategi yang dinilai mampu memberikan hasil lebih berkelanjutan. Studi di Sulawesi Selatan, misalnya, menunjukkan bahwa revitalisasi kelembagaan ekonomi dan sosial yang melibatkan pelaku lokal mampu meningkatkan pendapatan serta memperkuat jaringan sosial masyarakat miskin. Pemberdayaan ini juga memberi peluang masyarakat untuk mengelola sendiri sumber daya yang ada, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan langsung pemerintah.

Meskipun demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar dan strategi penciptaan lapangan kerja yang tepat sasaran agar dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan (Saragih, 2015). Tanpa perencanaan dan pendanaan yang memadai, efektivitas program akan sulit tercapai.

Studi kasus di Kota Bandar Lampung menunjukkan tantangan lain dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dirancang untuk memberdayakan usaha mikro di kalangan masyarakat miskin masih menghadapi hambatan berupa data yang kurang akurat dan rendahnya partisipasi aktif warga (Purnomo & Utami, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pelibatan masyarakat.

Program berbasis bantuan tunai bersyarat seperti PKH terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan, akses pendidikan, dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada indikator sosial setelah penerapan PKH, terutama dalam keberlanjutan pendidikan anak-anak penerima bantuan (Pratama & Chandra, 2022). Namun, ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan ini berpotensi menciptakan kerentanan baru jika program dihentikan.

Tantangan lain yang sering muncul dalam literatur adalah ketidaksesuaian data kemiskinan dengan kondisi lapangan. Studi di Kota Baubau menunjukkan bahwa ketidakakuratan data dan ketimpangan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi mengurangi efektivitas program penanggulangan kemiskinan (Jufri et al., 2024). Ketepatan sasaran program memerlukan sistem pendataan yang mutakhir dan akurat.

Selain pendekatan formal pemerintah, strategi pengentasan kemiskinan juga dapat diperkuat melalui inisiatif sosial-keagamaan. Penelitian di Gampong Pineung, Banda Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan pendapatan warga miskin (Yunus, 2013). Pendekatan berbasis nilai dan partisipasi masyarakat ini terbukti mampu membangun rasa kepemilikan terhadap program.

Literatur secara umum menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perkotaan yang paling efektif adalah yang menggabungkan intervensi sosial formal, pemberdayaan ekonomi, dan pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi data yang akurat, perencanaan yang partisipatif, dan dukungan pendanaan jangka panjang menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai strategi pengentasan kemiskinan perkotaan melalui tinjauan literatur dari jurnal nasional terakreditasi dan artikel yang terindeks Google Scholar. Fokus kajian meliputi efektivitas program, hambatan implementasi, serta potensi inovasi kebijakan yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Dengan memahami pola keberhasilan dan kegagalan di berbagai wilayah, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan secara holistik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode literature review dengan pendekatan *systematic review*. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi pengentasan kemiskinan perkotaan melalui telaah kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan resmi. Proses *systematic review* dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi topik, perumusan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, seleksi artikel, analisis isi, hingga penarikan kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, DOAJ, ScienceDirect, dan ProQuest untuk memastikan kualitas dan kredibilitas publikasi yang ditelaah. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel dipublikasikan dalam rentang waktu 2015–2025 untuk menjamin relevansi data terkini, (2) diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional bereputasi, (3) memuat pembahasan terkait strategi, program, atau kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan, dan (4) tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak memuat data empiris atau analisis kebijakan yang relevan, serta publikasi populer yang tidak melalui proses peer review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan proses penelusuran literatur yang dilakukan pada basis data Google Scholar, Garuda Kemdikbud, DOAJ, ScienceDirect, dan ProQuest, diperoleh sebanyak 86 artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi menggunakan

tahapan PRISMA, jumlah artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis berjumlah 28 publikasi yang terdiri dari 19 jurnal nasional terakreditasi Sinta dan 9 jurnal internasional bereputasi. Artikel-artikel tersebut berasal dari periode publikasi 2015–2025 sehingga mencerminkan perkembangan strategi pengentasan kemiskinan perkotaan terkini. Analisis tematik terhadap literatur yang terpilih menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perkotaan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Bantuan Sosial Langsung – mencakup program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi cenderung bersifat jangka pendek dan berpotensi menciptakan ketergantungan jika tidak diikuti strategi pemberdayaan (Pratama & Chandra, 2022).
2. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas – meliputi pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, koperasi, dan revitalisasi kelembagaan ekonomi lokal. Studi di Sulawesi Selatan dan Banda Aceh menunjukkan bahwa strategi ini lebih berkelanjutan karena meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghasilkan pendapatan mandiri (Yunus, 2013).
3. Pendekatan Kebijakan dan Tata Kelola Daerah melibatkan perencanaan pembangunan inklusif, perbaikan pendataan kemiskinan, dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian di DIY dan Baubau menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk menurunkan angka kemiskinan perkotaan secara signifikan.

Selain itu, hasil telaah mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi strategi pengentasan kemiskinan perkotaan. Pertama, ketidakakuratan data kemiskinan yang menghambat penentuan sasaran penerima manfaat secara tepat. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yang menyebabkan intervensi pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ketiga, terbatasnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, terutama di kota-kota kecil dan wilayah penyangga metropolitan.

Beberapa publikasi juga menyoroti inovasi strategis yang mulai diimplementasikan, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pendataan kemiskinan (*big data poverty mapping*), integrasi CSR perusahaan swasta dalam program pemberdayaan ekonomi, serta penggunaan pendekatan social entrepreneurship untuk menciptakan lapangan kerja di wilayah perkotaan padat. Meskipun inovasi ini masih bersifat parsial, tren ini menunjukkan pergeseran dari strategi berbasis bantuan menuju strategi berbasis kemandirian.

Secara keseluruhan, telaah literatur ini menemukan bahwa strategi yang paling efektif adalah kombinasi antara bantuan sosial jangka pendek dengan pemberdayaan ekonomi jangka panjang, yang didukung oleh tata kelola data kemiskinan yang akurat serta koordinasi lintas sektor. Pendekatan terpadu ini mampu tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin perkotaan dalam jangka panjang.

Pembahasan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perkotaan di Indonesia tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal. Strategi bantuan sosial langsung, seperti PKH, BLT, KIP, dan KIS, terbukti mampu mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek dengan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama & Chandra (2022) yang menyatakan

bahwa bantuan tunai bersyarat dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperbaiki akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Namun, jika tidak diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial ini berisiko menciptakan dependency syndrome dan tidak mampu memutus rantai kemiskinan secara permanen.

Pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menjadi solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Melalui pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan penguatan kelembagaan lokal, masyarakat miskin perkotaan diberdayakan untuk menghasilkan pendapatan mandiri. Nujum (2010) dalam studinya di Sulawesi Selatan menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi bergantung pada adanya dukungan akses modal, pasar, dan pendampingan berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh Yunus (2013) yang menunjukkan bahwa program koperasi dan kewirausahaan sosial di kawasan perkotaan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata keluarga miskin hingga 30% dalam kurun dua tahun.

Di sisi lain, kebijakan dan tata kelola pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam efektivitas strategi pengentasan kemiskinan. Studi Saragih (2015) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta perbaikan mekanisme pendataan kemiskinan, merupakan faktor penentu keberhasilan program. Jufri et al. (2024) juga menyoroti bahwa anggaran yang memadai serta koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat utama agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. Dalam konteks ini, pengentasan kemiskinan bukan hanya persoalan distribusi bantuan, tetapi juga menyangkut perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Tantangan terbesar yang ditemukan dalam literatur adalah ketidakakuratan data kemiskinan. Masalah ini menyebabkan targeting error atau kesalahan sasaran penerima bantuan, yang berdampak pada inefisiensi program. Kesalahan data sering kali dipengaruhi oleh kurangnya pembaruan informasi secara berkala, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di tingkat daerah. Beberapa studi mengusulkan pemanfaatan big data dan poverty mapping berbasis GIS untuk meningkatkan akurasi data (Saputri et al., 2025), namun implementasi teknologi ini masih terkendala keterbatasan kapasitas SDM dan biaya investasi awal.

Partisipasi masyarakat juga menjadi isu penting yang sering terabaikan. Banyak program dirancang secara top-down tanpa melibatkan kelompok sasaran dalam proses perencanaan, sehingga intervensi yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Penelitian Purnomo & Utami (2018) menunjukkan bahwa pelibatan aktif warga miskin dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dapat meningkatkan relevansi program hingga 40% dan memperbaiki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program tersebut.

Selain itu, pembahasan literatur memperlihatkan adanya tren inovasi strategis di beberapa kota besar. Misalnya, integrasi program CSR perusahaan swasta dalam pengentasan kemiskinan di Jakarta dan Surabaya, yang tidak hanya memberikan bantuan modal usaha tetapi juga akses jaringan pemasaran. Pendekatan social entrepreneurship juga mulai dikembangkan, di mana pelaku usaha sosial menciptakan lapangan kerja bagi warga miskin melalui model bisnis yang berkelanjutan. Walaupun masih terbatas, strategi ini menunjukkan potensi besar dalam mengurangi angka pengangguran di perkotaan padat penduduk.

Secara konseptual, kombinasi antara bantuan sosial jangka pendek dengan pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang didukung oleh tata kelola data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor merupakan model paling efektif untuk pengentasan kemiskinan perkotaan. Pendekatan ini sejalan dengan teori

sustainable livelihoods yang menekankan pentingnya menggabungkan aset fisik, modal manusia, dan modal sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Chambers & Conway, 1992). Model terpadu ini memungkinkan intervensi yang bersifat holistik, tidak hanya menangani gejala kemiskinan tetapi juga mengatasi akar penyebabnya.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan agenda *global Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Dengan mengadaptasi strategi yang berbasis bukti, kolaboratif, dan inklusif, pemerintah daerah di Indonesia dapat lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan perkotaan. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan komitmen jangka panjang, keberlanjutan program, dan investasi pada inovasi teknologi pendataan kemiskinan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan perkotaan harus dilakukan secara multidimensi, melibatkan sinergi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, kebijakan berbasis bukti, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi. Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur efektivitas integrasi berbagai pendekatan ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda di wilayah perkotaan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan perkotaan di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensi yang memadukan bantuan sosial jangka pendek, pemberdayaan ekonomi jangka panjang, perbaikan tata kelola data kemiskinan, serta koordinasi lintas sektor. Bantuan sosial seperti PKH dan BLT efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga miskin, tetapi tidak cukup untuk mengatasi akar masalah kemiskinan tanpa dukungan strategi pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, penguatan UMKM, dan pengembangan kewirausahaan sosial terbukti mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Tantangan utama yang perlu diatasi meliputi akurasi data kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, serta keterbatasan anggaran daerah. Pendekatan terintegrasi yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* berpotensi menjadi model efektif dalam menurunkan angka kemiskinan perkotaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jufri, A., Nurlinah, N., & Irwan, A. L. (2024). Local Government and Poverty Alleviation in Baubau City, Indonesia. *Glocal Society Journal*, 1(2), 63–73.
- Nujum, S. (2010). Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Komunitas serta Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi dan Sosial di Sulawesi Selatan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8(3), 811–824.
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63–76.
- Purnomo, A., & Utami, S. S. (2018). Analisis Implementasi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kota Bandar Lampung). *E-JKPP*, 4(1), 2–13.
- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). Poverty Alleviation Strategy: Challenges and Opportunities in Realizing SDGs in Indonesia. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 523–538.

- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Yunus, M. (2013). STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH PERKOTAAN (Studi Kasus di Gampong Pineung Kota Banda Aceh). *Mentari: Majalah Ilmiah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 16(3).